

FUNGSI PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PENGLOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Marischo Ifan Trio
30.0349

Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 30.0349@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, S.H, M. Hum

ABSTRACT

Problem/Background: The large amount of waste piles that have not been optimally managed by third parties has disrupted the cleanliness and peace of the community environment, while this has been clearly explained in Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning Waste Management article 23 which explains the obligations of the waste manager. **Purpose:** Purpose of research this is to identify and analyze the implementation of the Supervision function in waste management and to describe the inhibiting factors and efforts made in carrying out the supervisory function in the implementation of waste management. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection used interview, observation and documentation techniques, then the validity of the data obtained by triangulation was carried out and using data analysis techniques with data reduction, data presentation which can then be drawn conclusions. **Results/Findings:** The supervisory function in the implementation of waste management has not run optimally because there are several factors that become obstacles in the implementation of waste management, problems in the implementation of waste management in several waste-prone areas that are difficult to reach by supervisors from the Muara Enim District Environmental Office . This can be seen from the data on the percentage of samaph production which has increased every year. In carrying out this function, the Muara Enim Regency Environmental Service found several obstacles in the form of limited resources, lack of budget, lack of public awareness and inadequate landfill land so that efforts must be made further in the form of, Conducting Socialization and coaching, Completing the facilities and infrastructure of the Environment Service and Carrying out coordination regarding the expansion of TPA land which can accommodate waste production to overcome obstacles to the supervisory function in the implementation of waste management in Muara Enim Regency. **Conclusion:** Based on this research it can be concluded that the Muara Enim Regency Environmental Service has supervised the implementation of waste management, but in practice there are several factors that become obstacles in waste management

Keywords: Monitoring Function, Waste Management, Environmental Service

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Banyaknya tumpukan sampah belum terkelola secara maksimal oleh pihak ketiga menyebabkan terganggunya kebersihan dan ketentraman lingkungan masyarakat sedangkan sudah jelas diterangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 23 yang menjelaskan mengenai kewajiban pihak pengelola sampah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam pengelolaan sampah dan untuk mendeksripsikan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. **Metode:** Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan keabsahaan data yang diperoleh dengan triangulasi serta menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, permasalahan yang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di beberapa area rawan sampah yang sulit dijangkau oleh petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut dapat dilihat dari data persentase produksi samaph yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim menemukan beberapa penghambat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya anggaran, minimnya kesadaran masyarakt serta lahan TPA yang kurang memadai sehingga mesti dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk, Melakukan Sosialisasi dan pembinaan, Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Melaksanakan koordinasi terkait perluasan lahan TPA yang dapat menampung produksi sampah untuk mengatasi hambatan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian ini mampu disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sudah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan padat. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah tersebut bertambah 1,48 juta jiwa (0,54%) dibanding posisi Desember 2021. Jumlah tersebut juga bertambah 3,13 juta jiwa (1,15%) bila dibandingkan dengan posisi Juni tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah

penduduk ini tentunya harus dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peranan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari berbagai aspek guna menjadi jaminan keberlangsungan hidup demi kesejahteraan masyarakat melalui upaya pembangunan baik dari segi dan sector fisik serta non fisik pada beberapa wilayah di Indonesia.

Pemerintah Bersama dengan masyarakat dan juga pihak ketiga (Swasta) mempunyai peran yang saling berhubungan dalam melakukan Kerjasama dengan kendali yang tetap berada di tangan pemerintah sendiri dengan hal itu maka dalam upaya pelaksanaan kinerja harus ditekankan terhadap pentingnya pengaturan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam melakukan pengaturan tata Kelola pemerintahan yang baik aspek, pengawasan memiliki peran penting guna menjaga fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. Pengelolaan pembangunan di berbagai sector memiliki pengaruh baik dan buruk. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa isu strategis yang sering menjadi dampak dari pembangunan itu sendiri sebagai contoh ialah permasalahan sampah yang apabila dalam tata Kelolanya tidak baik dapat menjadi penyebab pencemaran lingkungan dan memungkinkan dapat menimbulkan persebaran penyakit yang mempengaruhi Kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya menjalankan roda pemerintahan yang berasaskan desentralisasi yakni hak yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki makna yaitu kewenangan mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah. Adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan persampahan juga termasuk pembagian urusan pemerintahan di bagian urusan lingkungan hidup selanjutnya pemerintah memperkuat landasan hukum yakni Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat aturan khusus dalam hal menangani persoalan sampah.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim mencapai 617.850 jiwa di tahun 2022. Dalam upaya pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Muara Enim membuat suatu produk hukum yaitu Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam upaya melaksanakan tata Kelola persampahan Dinas Lingkungan Hidup

memiliki fungsi penting terhadap kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim. Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang bersih dan sehat. Berkaitan dengan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Muara Enim, dalam pasal 12 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dinas lingkungan hidup bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 memiliki fungsi dalam hal pengelolaan sampah .

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dengan dihadapkannya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan permasalahan sampah menunjukkan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, Pemerintah seyogyanya dianggap masih kurang dalam melakukan pengaturan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Senada dengan isi Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan pengelolaan sampah”.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta dimana proses pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta sebagaimana disebutkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 18 Huruf (b) “kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga”. Dalam melakukan kewajibannya, pihak pengelola sampah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Huruf (e) Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup yakni: “Pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah oleh pihak lain (Badan usaha)”.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim bahwa sampah yang dihasilkan per hari dengan total mencapai 432 Ton/hari, pada tahun 2020 sampai dengan 2022 produksi sampah di kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang bersumber dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dimana pada tahun 2020 produksi sampah mencapai 148,340 ton per tahun, data pada tahun 2021 produksi sampah mencapai

148,459 ton pertahun sedangkan pada tahun 2022 produksi sampah mencapai 157,809 Ton per tahun. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya produksi timbulan sampah serta sampah yang tidak terangkut yang ada di kabupaten Muara Enim mengindikasikan bahwa tata Kelola persampahan yang dilakukan oleh pihak pengelolaan sampah belum optimal sehingga menimbulkan tumpukan sampah dan sampah yang tidak terangkut.

Banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat serta bagi lingkungan, kesehatan, dan kebersihan maka sampah harus dikelola secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, kenyamanan, serta dalam rangka untuk mewujudkan kabupaten Muara Enim yang bersih dan terhindar dari dampak negatif sampah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pihak pengelola sampah dirasa sangat penting guna menganalisa kinerja yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah berjalan sesuai dengan kewajiban yang diemban oleh pihak pengelola sampah itu sendiri sesuai dengan perjanjian Kerjasama atau nota kesepahaman (MOU) dengan pihak ketiga yakni PT. RPSM Kinali yang dimana pihak pengelola sampah dan limbah selaku ini memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Segala kegiatan pengangkutan sampah dan limbah di lokasi Pihak Pertama dilakukan dibawah pengawasan Pihak Pertama atau petugas yang mewakili Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pengelolaan sampah dan limbah mulai dari proses pemilahan,
- c. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan pengangkutan Limbah B3 milik Pihak Pertama kepada Pihak Pertama.
- d. Apabila Pihak Kedua karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik di dalam maupun di luar lokasi Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan pengangkutan Limbah B3 milik Pihak Pertama kepada Pihak Pertama.

Dalam pelaksanaan pembagian kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya dalam hal pengurangan sampah Salah satu visi dan misi kabupaten Muara Enim memiliki tujuan untuk memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan serta yang menjadi sasarannya adalah berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup utamanya pada meningkatnya kualitas lingkungan

hidup yang baik. Dengan adanya lingkungan hidup yang baik (*good environment*) diharapkan akan tercipta pula pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pada akhirnya Muara Enim dapat menciptakan lingkungan yang sehat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Fitria Utari (2019) yang berjudul Strategi Pengawasan Aktif Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dengan melihat perkembangan bank sampah setiap harinya secara langsung pada setiap bank sampah dalam merubah pola perilaku masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Penelitian kedua yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Taufiqurrahman (2016) yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kecamatan Pujon perlu dengan adanya penambahan pewadahan, sehingga dapat mengurangi timbulan sampah. Perlu adanya perencanaan dan pembangunan TPS di setiap desa serta perlu adanya keterlibatan antara masyarakat dengan pihak pengelola kebersihan untuk memelihara dan menjaga lingkungan. Penelitian ketiga yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Rike Martha Yuliha (2021) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif dilihat dari 3 indikator, belum adanya kerja sama masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah serta terdapat hambatan yang memperlambat jalannya program diantaranya sumber dana yang tidak memadai serta sumber daya manusia yang masih minim.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga karya tulis ilmiah terdahulu sebagai referensi dan perbandingan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Ketiga karya tulis tersebut secara keseluruhan memiliki relevansi dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti. Dari ketiga penelitian tersebut didapatkan beberapa persamaan yaitu membahas tentang pengawasan dan pengelolaan sampah dan metode penelitian yang digunakan. Namun terdapat pula perbedaan dari ketiga penelitian tersebut yaitu pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, namun pada penelitian ini peneliti memilih topik berbeda yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu “ Fungsi Pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim” dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis fungsi pengawasan, hambatan, serta upaya yang dilakukan oleh dinas terkait yang mengawasi pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, untuk mendeskripsikan faktor penghambat pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pola penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data yang diperoleh secara kualitatif dan kemudian dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini sering digunakan dalam menganalisis suatu fenomena, kejadian, maupun keadaan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayidah (2018:24) “penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subyek yang diteliti, mengetahui karakteristik variable yang diteliti dalam suatu kasus tertentu”.

Melalui pendekatan ini, peneliti membuat sebuah gambaran kompleks, melakukan penelitian serta mengkaji laporan dan data-data yang terperinci dari informan. Selanjutnya melakukan studi mengenai situasi dan kondisi yang berada di lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2003:3) merupakan suatu prosedur dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan dari objek dan perilaku yang diamati.

Peneliti menggunakan operasionalisasi konsep dengan mengacu pada teori pengawasan dari Handoko (2013) yang memiliki 5 dimensi yaitu Tahapan Penetapan Standar, Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Dari dimensi tersebut terdapat sub dimensi yang masing-masing dimensi memiliki ukuran sebagai tujuan tercapainya dimensi tersebut. Sumber data pada penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menentukan sumber Informan peneliti menggunakan Teknik *Purposive sampling* yang dimana Teknik ini digunakan peneliti guna menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan *Snowball Sampling* digunakan peneliti dalam mencari informasi seperti bola salju atau secara acak berdasarkan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri dimana peneliti berperan melakukan berbagai kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data, wawancara, observasi dan menyimpulkan data-data tersebut dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan *participant observation* (observasi berpartisipasi), wawancara bentuk "*Semistructured interview*" dengan memakai pedoman wawancara yang disertai dengan objek informan yang akan digali informasinya serta melalui studi dokumentasi dimana peneliti akan mencari berbagai informasi melalui sumber dari dokumen-dokumen yang terdapat pada dinas terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung proses penelitian dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Agar dapat mengetahui fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan peneliti menggunakan teori Hani Handoko (2013) yaitu mengemukakan bahwa ada lima tahap dalam proses

pengawasan yaitu Tahapan Penetapan Standar, Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

1. Tahap Penetapan Standar

Proses pengawasan diawali dengan tahapan penetapan standar pelaksanaan. Standar merujuk pada suatu ukuran yang dijadikan sebagai acuan yang digunakan dalam melihat serta menganalisa hasil akhir dari suatu kegiatan. Tujuan, sasaran, kuota, serta target pelaksanaan digunakan sebagai tahapan penetapan standar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim menentukan tujuan dari pengawasan dalam pengelolaan sampah yakni meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelola sampah serta mengawasi jalannya kinerja pihak pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalisir produksi sampah yang ada di Kabupaten Muara Enim serta bertujuan agar lingkungan masyarakat bersih, sehat, dan tentram. Tujuan merupakan indikator penting dalam penetapan tercapainya keinginan yang sudah ditentukan dalam suatu program kerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yakni pihak pengelola sampah agar meminimalisir terjadinya permasalahan sampah yang sering dikeluhkan karena banyaknya tumpukan sampah yang tidak bagus dipandang baik di ruas jalan, alun, serta di dekat TPS yang sudah dibangun. Sasaran juga ditujukan agar pihak pengelola sampah lebih meningkatkan kinerja upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim.

Kuota merupakan jumlah personil yang ditentukan sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Penentuan Jumlah personil ditentukan berdasar dengan kualifikasi anggota personil yang melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan.

Tabel 4.1

Daftar Nama Tim Pengawas bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3

No.	NAMA	JABATAN
1.	Aripin	Penanggungjawab
2.	Ladi Tri Kurnia	Ketua
3.	Sadri	Anggota

4.	Nopirin	Anggota
5.	Endang Mardiaty	Anggota
6.	Toibah Wasilah	Anggota
7.	Rusdah	Anggota
8.	Susilawaty	Anggota
9.	Irawany Susilawaty	Anggota
10.	Paspawan	Anggota
11.	Fitriana	Anggota
12.	Sarjuni	Anggota
13.	Junaidy	Anggota
14.	Darmansyah	Anggota
15.	Edy Bahtiar	Anggota

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

Disaat turun ke lapangan kuota serta jumlah personil yang melakukan pengawasan berdasar situasi dan kondisi lapangan dengan membentuk sebuah tim khusus pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dikarenakan menjadi fungsi dari Dinas lingkungan Hidup dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Target yang ingin dicapai oleh pihak OPD sejalan dengan misi Dinas Lingkungan Hidup yakni memanfaatkan potensi SDM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan sehingga lingkungan masyarakat bersih, sehat, dan tentram. Dalam target pelaksanaan peneliti mengamati bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup membuat target pelaksanaan untuk membuat lingkungan yang bersih terhindar dari permasalahan sampah serta peningkatan terhadap kinerja pengelolaan sampah di bidang lingkungan hidup.

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan penetapan standar tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya apabila tidak disertai dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, Langkah lanjutan dalam proses pengawasan ialah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara terukur. Bentuk pengukuran serta pihak yang terkait menjadi poin utama dalam penetapan pelaksanaan standar kegiatan.

Intensitas pelaksanaan merupakan suatu ukuran dalam penentuan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa jadwal pelaksanaan (*time Schedule*) yang

digunakan sebagai alat pengukur kegiatan secara keseluruhan agar berjalan sesuai rencana. Dinas lingkungan hidup telah melaksanakan penentuan terhadap pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal tersebut dilakukan dengan intensitas pelaksanaan ke lapangan yang dilakukan oleh bagian pengawas setiap hari guna melihat adanya permasalahan ataupun tidak yang terjadi terkait pihak pengelola sampah yang melaksanakan tugasnya. Dalam pengamatan peneliti

Bentuk pengukuran dalam tahapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa laporan-laporan tertulis serta lisan melalui perangkat komunikasi. Bentuk pelaporan merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dimana dalam melaksanakan kegiatan harus adanya pelaporan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam kegiatan. Bentuk pengukuran terhadap pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah bagian tim pengawas melaksanakan pengamatan secara visual dengan hal itu dapat melihat seberapa optimalnya pengawasan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah sehari-hari. Jika sudah sesuai dengan penglihatan maka indikasi bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan optimal hanya saja permasalahan yang terjadi sehari-hari disebabkan oleh beberapa faktor.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat serta pihak pengelola sampah untuk melaporkan serta memberikan informasi terkait kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan dikarenakan objek yang diawasi merupakan permasalahan tumpukan sampah dan kinerja dari pihak pengelola sampah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan 3 indikator dan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sudah melaksanakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dimana hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pada tahapan ini penetapan standar tidak akan berguna jika tidak menyertakan cara pengukuran pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga indikator ini sangat berguna dalam penentuan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan berlangsung sebagai prosedur yang terus menerus dan iterative. Selama tahap pengukuran. Metode

yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan, antara lain observasi, laporan, dan prosedur otomatis, digunakan pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Pengamatan atau observasi yaitu melaksanakan pengamatan terhadap objek untuk dijadikan sebagai bahan yang dilakukan selanjutnya. Pengamatan dalam tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan unsur paling penting untuk mengetahui kejadian *real* dilapangan secara mendetail. Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengamatan di lapangan dengan melihat secara langsung keadaan yang terjadi di beberapa area rawan sampah serta area kerja dari pihak pengelola sampah di Kabupaten Muara Enim. Setelah pengamatan dilakukan selanjutnya pengamatan tersebut dijadikan bahan evaluasi sekaligus koreksi yang kemudian dicari pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

Peneliti mengamati bahwa dalam melakukan pengamatan terhadap pihak pengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup terjun langsung dalam melakukan pengawasan sehingga dari hal tersebut langsung dapat di identifikasikan masalah kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan pemecahan masalah.

Laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dijadikan sebagai bahan koreksi atau evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim berupa laporan lisan dan melalui media. Dari laporan-laporan yang disampaikan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

Metode-metode otomatis yaitu melakukan pengukuran dengan memakai metode yang telah ditentukan. Metode-metode ini digunakan agar mempermudah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dalam upaya pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah. Disamping melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah juga menerapkan metode pendekatan sosialisasi dan menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga tugas dari tim pengawas Dinas lingkungan hidup tidak hanya berfokus memantau pekerjaan pihak pengelola sampah akan tetapi juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar meminimalisir permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

Berdasar dari 3 (tiga) indikator teori pengawasan T. Hani Handoko serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan berpengaruh penting terhadap kelancaran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar mempermudah dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah sudah berjalan sesuai dengan program atau tidak.

4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Dalam proses pengawasan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata terhadap pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan. Dalam tahapan ini tingkat kesukaran dapat terjadi pada saat menafsirkan adanya suatu penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisis untuk penentuan terhadap standar yang dicapai dan tidak dapat dicapai.

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditentukan menjadi unsur yang tidak kalah penting, dikarenakan pada tahapan ini adakalanya terdapat penyimpangan yang dapat terjadi antara pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditentukan. Adanya perbandingan bertujuan untuk menganalisis letak suatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Standar yang telah ditentukan sebelumnya terhadap pelaksanaan nyata berkesesuaian sehingga dalam melaksanakan pengawasan seirama dengan target yang hendak dicapai.

Selanjutnya penyimpangan yang terjadi diakibatkan oleh oknum masyarakat yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga oknum dari pihak pengelola sampah yang terkadang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Jika hasil analisis mempertunjukkan perlu adanya suatu tindakan koreksi maka tindakan harus segera dilakukan. Tindakan koreksi diambil dalam bentuk standar yang mungkin akan diubah, pelaksanaan kegiatan perbaikan, atau dilakukan secara serentak.

Mengubah standar sangat diperlukan jika dianggap perlu dilakukan atau terdapat suatu koreksi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga diharapkan dengan adanya perubahan standar dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tidak mengubah standar dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti

pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pihak pengelola sampah dan juga peningkatan terhadap pengelola sampah yang melaksanakan tugas dalam mengelola sampah.

Tahapan pengambilan koreksi selanjutnya adalah mengubah pengukuran pelaksanaan dikarenakan pelaksanaan yang telah dilakukan dianggap belum sesuai dengan harapan sehingga dengan adanya perubahan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi saran masukan untuk kegiatan yang lebih baik lagi kedepannya. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak harus mengubah standar akan tetapi, lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap hal-hal yang menyebabkan permasalahan sampah di Kabupaten Muara Enim mencuat ke media.

Mengubah cara dalam menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan yang biasanya terjadi dapat dijadikan solusi dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan sehingga harapan yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dinas Lingkungan Hidup tidak mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Tahap pengambilan tindakan koreksi mengubah cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan merupakan bagian penting apabila diperlukan adanya koreksi. Akan tetapi, sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan tugas pengawasan berjalan sesuai dengan harapan sehingga perubahan analisa atau menafsirkan penyimpangan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Berdasarkan 3 indikator serta hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melaksanakan Analisa terhadap masalah yang ada kemudian mengambil tindakan koreksi sesuai teori T. Han Handoko hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan dan diharapkan akan berpengaruh terhadap pemecahan permasalahan pengelolaan sampah.

3.2 Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi di lapangan yang peneliti lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dalam dapat ditarik kesimpulan ada beberapa faktor penghambat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memaksimalkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah sumber daya dalam hal ini yakni sumber daya manusia hal ini dikarenakan banyaknya titik rawan tumpukan sampah yang ada di Kabupaten Muara Enim tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang melaksanakan pengawasan pelaksanaan sampah sehingga, dengan upaya apapun tumpukan sampah akan terus mengalami peningkatan apabila sumber daya manusia yang dimiliki instansi Dinas Lingkungan Hidup terbatas.
- b. Kurangnya Sumber Daya Anggaran dalam proses pengawasan
Untuk melakukan proses pengawasan dibutuhkan anggaran yang cukup akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim masih terkendala dalam hal penganggaran yang dimana anggaran yang diperlukan guna melakukan pengawasan terhadap beberapa area titik sampah di beberapa kecamatan yang luas, anggarannya cukup besar, terkhusus berkaitan dengan operasional kendaraan, pangan, tim, dan estimasi proses pengawasan Ketika berada di lapangan.
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk menjaga lingkungan
Faktor penghambat lainnya ialah berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan karena sekuat apapun usaha serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak dibarengi dengan upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan maka proses pengawasan yang dilakukan tidak akan pernah berhasil untuk diminimalisir karena masyarakat sendiri yang kadang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- d. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Kurang Memadai
Keberadaan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai tentunya dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik. Akan tetapi, untuk lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Muara Enim hanya ada satu sehingga membuat tumpukan sampah di beberapa titik meningkat TPA tersebut menampung keseluruhan sampah di Kabupaten Muara Enim dan dilatarbelakangi oleh jumlah operasional yang ada beberapa rusak dan baik sehingga untuk mengelola sampah membutuhkan waktu yang lebih lama, hal ini dapat dilihat dari data jumlah sarana dan prasarana yang sedikit dan ada beberapa keadaannya buruk yang dimana

mengingat banyaknya titik area rawan sampah sehingga dalam melaksanakan pengawasan serta pengelolaan sampah menjadi terhambat dan tidak maksimal.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ada berbagai kendala dalam proses melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah. Hal ini membutuhkan upaya guna mengatasi kendala tersebut dan untuk mengoptimalkan outputnya. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim. Upaya-upaya tersebut digambarkan dibawah ini.

a. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup

Guna mendukung kelancaran dan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas bidang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup terus membenahi segala macam kekurangan kearah yang lebih baik. Salah satunya yakni penambahan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Sarana dan prasarana yang memadai akan sangat berguna dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan serta pergerakan anggota tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di beberapa lokasi akan semakin efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat pencapaian tujuan yang sudah ditentukan yakni lingkungan yang bersih, sehat, dan tentram.

b. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat agar Bersama menjaga kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta efek buruk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang tidak terkelola sehingga dapat meminimalisir produksi sampah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan

- c. Memperluas lahan TPA yang dapat menampung produksi sampah di Kabupaten Muara Enim

Dalam proses pengelolaan sampah, TPA merupakan unsur penting dalam proses tata Kelola sampah karena disinilah tempat pemrosesan akhir dari sampah yang dikelola. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan perluasana lahan TPA yang digunakan untuk proses akhir pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim dikarenakan untuk TPA di Kabupaten Muara Enim hanya satu TPA untuk menampung keseluruhan produksi sampah di beberapa kecamatan sehingga guna meningkatkan pelaksanaan pegelolaan sampah dan meminimaliisir permasalahan sampah maka dilakukan perluasan lahan TPA untuk menampung produksi sampah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini membahas tentang fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Hani Handoko (2013) yang menjelaskan tentang lima tahap dalam proses pengawasan, yaitu tahap penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim menentukan tujuan pengawasan dalam pengelolaan sampah, seperti meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelola sampah dan mengawasi kinerja pihak pengelola untuk meminimalisir produksi sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tentram. Selain itu, penetapan standar juga mencakup sasaran dan kuota pengawasan.

Pada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan standarnya. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan intensitas pelaksanaan sebagai ukuran pengawasan. Mereka melakukan pengamatan dan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara visual, serta melibatkan masyarakat dan pihak pengelola sampah untuk memberikan informasi terkait kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi, laporan, dan metode otomatis. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai

keadaan nyata di lapangan, sedangkan laporan digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi. Dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup juga menerapkan metode sosialisasi dan penggalian informasi dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah.

Selanjutnya, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan antara pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan tersebut dianalisis untuk menentukan tindakan koreksi yang diperlukan. Dalam hal ini, penyimpangan dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan kurang optimalnya kinerja pihak pengelola sampah.

Terakhir, jika hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan tersebut harus segera dilakukan. Tindakan koreksi dapat berupa perubahan standar, perbaikan pelaksanaan kegiatan, atau tindakan lain yang diperlukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dapat mengubah standar jika dianggap perlu atau melakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini serta analisis data yang sudah dijabarkan di dalam pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, permasalahan yang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di beberapa area rawan sampah yang sulit dijangkau oleh petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut dapat dilihat dari data persentase produksi sampah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor Penghambat dari Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muara Enim, yaitu keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya sumber daya anggaran dalam proses pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi faktor penghambat Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muara Enim yakni dengan melakukan Sosialisasi dan pembinaan demi meningkatkan kesadaran masyarakat setempat agar

Bersama menjaga kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah. Serta melaksanakan koordinasi terkait perluasan lahan TPA yang dapat menampung produksi sampah guna meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah dan meminimalisir permasalahan sampah sehingga pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lancar.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya berfokus pada fungsi Pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera, sehingga generalisasi temuan hanya berlaku untuk konteks tersebut. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi faktor yang membatasi dalam mengumpulkan data yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan fungsi Pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi menyeluruh kepada lapisan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menjaga lingkungan serta membuat program dalam upaya pengurangan sampah bagi masyarakat dan pihak lainnya seperti Bank sampah, komunitas pecinta lingkungan, serta hal lainnya yang dapat dijadikan upaya dalam pengurangan sampah.
2. Peningkatan terhadap sumber daya manusia serta sumber daya anggaran guna kelancaran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tata Kelola sampah yang ada di Kabupaten Muara Enim
3. Melakukan perluasan TPA dalam upaya peningkatan proses pengolahan sampah serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional serta guna melancarkan proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.

4. Melakukan pemberian sanksi bagi pihak pengelola sampah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku serta memberikan penghargaan bagi pihak pengelola sampah yang melaksanakan tugas penuh tanggung jawab guna meningkatkan semangat motivasi dan mengoptimalkan proses kinerja dalam Tata Kelola persampahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Hadiwiyoto, 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu
- Handoko, T. H. 2013. *Manajemen edisi 2 (Kedua)*. BPFE Yogyakarta
- Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Rahyunir, Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya)*, Yogyakarta: Nusa Media
- Sinaga, Y. E. (2014). Intensitas Pengawasan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Taufiqurrahman, T. (2016). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, ITN Malang)*.
- Utari, F. (2019). *Strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Yulia, R. M. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)*.